

## **PENGARUH KONEKSI POLITIK, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Surono<sup>1\*</sup>**

**Sekar Mayangsari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Trisakti

[\\*juwono.surono@gmail.com](mailto:*juwono.surono@gmail.com)

### **Abstract**

*This study was conducted to obtain empirical evidence that political connections, family ownership, and firm size influence the company's CSR disclosure. This study uses quantitative methods as a research approach. All go public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Indonesia State-Owned Enterprises (BUMN) are the population in the study. Data were obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the form of annual report data and company sustainability reports. Then the determination of the sample in this study was carried out using a non-probability sampling method, through a purposive sampling technique to obtain a representative sample according to the researcher's criteria. This study utilizes multiple regression analysis as a data analysis technique using SPSS version 24.*

*Based on the data that has been collected and the tests that have been carried out on 56 samples of companies using multiple regression models, it can be concluded that political connections, family ownership, and company size have a positive influence on CSR disclosure of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and companies of BUMN in the period 2015 -2019.*

**Keywords:** *Company Size; Corporate Social; Family Ownership; Political Connection; Responsibility Index (CSRDI).*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa koneksi politik, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Adapun seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi populasi dalam penelitian. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni berupa data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode non probability sampling, melalui teknik penentuan sampel purposive sampling yang tujuannya untuk mendapat sampel representatif sesuai kriteria peneliti. Penelitian ini memanfaatkan analisis regresi berganda sebagai teknik analisis datanya, dengan menggunakan program SPSS versi 24.*

*Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 56 sampel perusahaan dengan menggunakan model regresi berganda, maka*

*dapat disimpulkan bahwa koneksi politik, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan go public dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015-2019.*

**Kata Kunci :** Indeks Tanggung Jawab Sosial (CSRDI); Kepemilikan Keluarga; Koneksi Politik; , Perusahaan; Ukuran Perusahaan.

*Submission date: 2021-09-09*

*Accepted date: 2022-02-25*

---

*\*Corresponding Author*

## **PENDAHULUAN**

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) telah berkembang dan menjadi salah satu hal penting bagi setiap perusahaan. *Sustainability report* menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya kepada seluruh pemangku kepentingan (Simbolon dan Memed, 2016). Mulpiani (2019) mengungkapkan bahwa kecenderungan pengungkapan *Sustainability Reporting* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berawal pada tahun 2005 hanya satu perusahaan. Menurut *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR), sampai akhir 2016 terdapat 120 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia, baik perusahaan yang *go public* maupun perusahaan yang *privat*. Namun, jumlah tersebut masih jauh dibawah jumlah perusahaan yang tercatat pada bursa efek apalagi jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. *Sustainability Report* ini disusun dengan sebuah acuan atau dasar yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan sebuah organisasi nonprofit yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi. GRI menghasilkan standar yang umum digunakan perusahaan di dunia untuk pelaporan keberlanjutan seperti *Environmental Social Governance* (ESG).

Kegiatan CSR perusahaan di Indonesia pada umumnya dinilai hanya sebatas lingkup kegiatan sukarela yang dilaksanakan perusahaan untuk suatu komunitas misalnya memberikan bentuk santunan keluarga kurang mampu, pemberdayaan masyarakat, membantu menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum dan lainnya. Perusahaan membuat CSR juga dipandang sebagai penampilan untuk pencitraan perusahaan di mata masyarakat. Penyelenggaraan CSR didasarkan untuk pembangunan yang berkelanjutan baik sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar, tata kelola perusahaan yang bersih, melestarikan lingkungan dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pengungkapan laporan tanggung *corporate social responsibility* (CSR) dengan sukarela secara nyata menarik perhatian penelitian dalam beberapa dekade terakhir karena bertambahnya minat masyarakat dalam CSR (Muttakin *et al.*, 2018). Perusahaan yang terhubung secara politis lebih mungkin menghadirkan lebih baik pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait hubungan antara kehadiran politisi di Dewan Direksi perusahaan dan pelaporan CSR (Bianchi, 2019). Perusahaan yang mempunyai hubungan politik telah banyak meningkatkan kinerja CSR terutama dibidang filantropi (Huang & Zhao, 2016).

Gagasan kewajiban sosial Perusahaan (CSR) berawal pada tahun 1920-an; Tetapi, akibat terjadinya Perang Dunia II maka topik ini gagal menjadi topik serius di antara para pemimpin bisnis hingga tahun 1950-an. CSR kembali menjadi sorotan pada tahun 1951 disaat Frank Abrams, ketua dewan *Standard Oil of New Jersey*, menyunting artikel di *Harvard Business Review* yang mengungkapkan jika kewajiban bisnis adalah: untuk melakukan urusan perusahaan dengan tetap menjaga keseimbangan antara berbagai tuntutan yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan, yakni keseimbangan yang harmonis antara pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.

Awalnya pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela atau *voluntary*, hingga pemerintah merasa bahwa CSR merupakan hal yang sangat penting dan krusial hingga akhirnya Indonesia pun menjadi negara pertama yang mewajibkan pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Di Indonesia pelaksanaan CSR dipertegas dalam hukum yang ditulis.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan untuk melaksanakan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) seperti pada Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 pasal 1 ayat (7) berisi mengenai Program Bina Lingkungan berupa program pemanfaatan keadaan sosial masyarakat oleh BUMN, dimana dengan memanfaatkan bagian dari keuntungan BUMN. Program tersebut diantaranya: bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan bencana alam, pengembangan infrastruktur sarana umum, pengembangan kesehatan, pelestarian alam, serta untuk sarana ibadah.

Bowen (1953) membuat kontribusi ilmiah pertama yang signifikan dengan menerbitkan buku tentang CSR. Ia mengusulkan definisi CSR sebagai "kewajiban bisnis untuk membuat kebijakan keputusan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pula langkah yang diinginkan terkait dengan tujuan dan nilai sosial. Beberapa dekade berikutnya, definisi, praktik, dan adopsi CSR semakin berkembang.

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR adalah koneksi politik. Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menghindari potensi tekanan pemangku kepentingan untuk keterlibatan CSR. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dan pemerintahan, dimana kegiatan sosial perusahaan dilakukan untuk melayani pemerintah guna mendapatkan dukungan dan manfaat politik yang berkelanjutan (Xu & Zeng, 2016; Zhang, 2017; Wang *et al.* 2018). Koneksi politik merupakan jabatan, kekuasaan dan kepemilikan saham perusahaan yang terhubung dengan Pemerintah baik Kepala Pemerintahan Pusat dan Departemen dibawahnya, Kepala Daerah, Anggota Dewan, BUMN, BUMD, Partai Politik dan jabatan lainnya yang terhubung dengan jabatan dan kekuasaan politik. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa jabatan dan kekuasaan di Pemerintahan yang lahir dari mekanisme partai politik dianggap syarat dengan kepentingan yang berkonotasi negatif (Sahir, Sultan dan Syamsuddin, 2021).

Peristiwa yang tidak mudah dilupakan oleh masyarakat tentunya pada saat agenda menjelang pemilihan umum Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif. Partai politik peserta pemilu berlomba lomba menarik perhatian dan simpati masyarakat dengan janji-janji politik yang akan dilaksanakan ketika terpilih nanti. Bentuk simpati antara lain ditunjukkan dengan sikap kedermawanan partai politik dalam hal sosial kemasyarakatan maupun kepada calon pemilih atau konstituennya. Politik uang tentunya tidak bisa dihindari meskipun dilarang. Demikian sebaliknya ketika agenda politik sudah selesai, pendapat umum masyarakat merasa ditinggalkan janji-janji

politik yang pernah disampaikan oleh pemimpin yang terpilih bahkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan simpati bantuan kepada masyarakat tidak ada dan dilupakan (Ghafur, 2018). Jika cara pandang masyarakat yang apatis terhadap politik terus berkembang dan menimbulkan ketidakpercayaan dikalangan masyarakat akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Persepsi politik tidak bisa digeneralisasi buruk, hal ini lebih kepada perilaku oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat citra politik dimasyarakat tidak baik.

Lebih lanjut, kepemilikan keluarga juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Menurut Sari (2016) kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan terkonsentrasi karena persentase jumlah saham yang dimiliki pihak keluarga paling besar. Sari (2016) menambahkan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan oleh keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikendalikan oleh publik tanpa pengendali utama. Sehingga mengindahkan prinsip-prinsip dari *corporate governance*. Kepemilikan keluarga memberikan pengaruh secara positif terhadap pengungkapan CSR namun tidak signifikan dan keberadaan komisaris independen semakin menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung rendah dalam menyajikan informasi terkait CSR (Nurfatihah, 2018). Keluarga sebagai pemegang saham pengendali mempunyai akses informasi lebih luas daripada minoritas pemegang saham, yang menyebabkan peningkatan informasi asimetri antara pengendalian pemilik saham minoritas dan pemegang saham. Kepemilikan keluarga dapat menimbulkan konflik keagenan yang lebih besar yang bisa terjadi mengarah meningkatkan risiko yang terkait dengan manajemen laba yang berdampak pada CSR perusahaan (Kumala & Siregar, 2020).

Ukuran perusahaan memperlihatkan besar tidaknya perusahaan dari melihat nilai kekayaan perusahaan untuk tahun yang dihitung dengan  $\ln(Ln)$  dari total aset. Jika perusahaan mempunyai aset dengan jumlah yang besar, hal ini memperlihatkan jika perusahaan tersebut telah meraih tingkat kesempurnaan. Sementara ukuran perusahaan juga dapat memberikan pengaruh CSR terkait dengan agensi teori, perusahaan dengan biaya keagenan yang lebih tinggi akan memperlihatkan informasi secara terperinci (Fawwazy, 2019). Ukuran perusahaan signifikan memberi pengaruh perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan arah positif. Apabila ukuran perusahaan semakin meningkat, sistem informasi pelaporannya pun semakin baik dan dapat menghasilkan berbagai informasi keuangan serta informasi lain yang dibutuhkan investor (Waluyo, 2017).

Penelitian ini adalah pengembangan dan pembaharuan dari penelitian Bianchi (2019) dengan kesamaan variabel bebas (independen) yakni koneksi politik dan variabel terikat (dependen) yaitu pengungkapan CSR. Terdapat pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian Bianchi (2019) ialah:

1. Peneliti memanfaatkan koneksi politik yang berada di wilayah pemerintahan Indonesia yang dijadikan sebagai variabel independen.
2. Peneliti menambahkan kepemilikan keluarga yang dijadikan sebagai variabel independen.
3. Peneliti menambahkan ukuran perusahaan yang dijadikan sebagai variabel independen.

Dari uraian diatas diperoleh rumusan masalah seperti; (1). Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. (2). Apakah kepemilikan

keluarga berpengaruh pengungkapan CSR perusahaan. (3). Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Legitimasi

Teori legitimasi pada awalnya diperkenalkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang memberikan gambaran pembeda diantara nilai-nilai yang diterima perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat sehingga terjadi perbedaan dan dikenal dengan istilah legitimasi gap. Jika perusahaan tidak peka terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan dan harapan masyarakat perusahaan, serta hanya berfokus pada memaksimalkan pendapatan, maka muncul kesenjangan legalitas.

Teori ini sering digunakan dalam berbagai penelitian untuk lebih memahami tentang CSR sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan, mendapatkan penerimaan sosial, dan pada akhirnya berdampak pada kelangsungan hidup organisasi (Duff, 2017; (Lai *et al.*, 2020); Lee & Comello (2018); Muttakin *et al.*, (2018). Ketika pemangku kepentingan berpendapat bahwa praktik yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan/atau tidak memiliki legitimasi (ketika legitimasi suatu organisasi terancam punah), maka perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi legitimasi untuk meminimalkan ancaman-ancaman tersebut dengan berupaya mempengaruhi tindakan dan persepsi pemangku kepentingan (Sampong *et al.*, 2018).

Dengan demikian, hubungan teori legitimasi dengan luas pengungkapan CSR adalah pelaksanaan dan pengungkapan CSR dianggap oleh manajemen perusahaan sebagai salah cara untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, investor, kreditur, dan lain-lain melalui aktivitas sosial yang dilaksanakan atau kontrak sosial yang menuntut perusahaan untuk menanggapi lingkungan di mana mereka beroperasi, sehingga CSR merupakan cara untuk menjaga legitimasi antara perusahaan dengan lingkungannya.

### Teori Sinyal (*Signaling theory*)

Aktivitas perusahaan selalu mempengaruhi pemangku kepentingan seperti karyawan, investor, pemasok, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Inisiatif ini telah menarik perhatian pemangku kepentingan, utamanya calon investor serta para investor dimana mereka merupakan penanam dan pemilik modal. Karenanya, perusahaan wajib melaporkan kepada pemangku kepentingan sebagai informasi (Silalahi & Ardini, 2017). Diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif bagi perusahaan, termasuk laporan tambahan seperti Laporan Kegiatan CSR perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memberi indikasi kepada pemangku kepentingan tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karenanya, investor dan masyarakat diharapkan dapat melihat tanda yang dimunculkan perusahaan bahwa perusahaan tak hanya mencari keuntungan tetapi juga peduli akan lingkungan sekitar, sehingga perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pengungkapan CSR dapat digunakan manajemen untuk memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa perusahaan bertanggungjawab terhadap seluruh dampak dari aktivitas perusahaan. Berdasarkan teori sinyal, kegiatan sosial dan lingkungan memberikan informasi kepada investor tentang prospek return masa depan yang substansial. Pengungkapan *corporate social responsibility* bertujuan untuk

meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham (Sari, 2016).

### **Teori *Rent-Seeking***

Istilah *rent seeking* awalnya diperkenalkan (Tullock, 1967), dimana *rent-seeking* berlangsung sewaktu seorang usahawan atau perusahaan memperoleh keuntungan atau nilai dari pihak lain dengan mengubah bisnis atau lingkungan bisnis. Perjuangan untuk mendapatkan monopoli atas aturan atau regulasi permainan mengubah lingkungan bisnis. Oleh karena itu, pengusaha profesional melobi untuk mempengaruhi kebijakan sehingga mereka lebih memilih diri mereka sendiri dengan mengorbankan pihak lain, maka disebut sebagai *rent seeker*. Koneksi politik dan pemanfaatan kekuatan dari koneksi tersebut sangat erat kaitannya dengan *rent-seeking theory*. Istilah *rent-seeking* kemudian dikembangkan oleh Krueger pada Juni 1974. Krueger (1974) menyatakan bahwa *rent-seeking* berarti berusaha mendapatkan keuntungan melalui monopoli, perizinan dan penggunaan modal usaha. Pengusaha menghasilkan uang dengan bersaing secara tidak adil dengan pengusaha lain. *Rent-seeking* terdiri dari beberapa bentuk tetapi dalam literatur-literatur paling sering dikaitkan dengan lobi, penyuapan dan korupsi (Choi & Storr, 2018). Para aktor politik dapat mengumpulkan pendapatan dengan berusaha untuk membatasi, melonggarkan aturan tertentu, memudahkan akses ke izin tertentu dan layanan berharga lainnya (Munger, 2018).

Praktek *rent seeking* tidak dapat dihentikan kecuali negara menerapkan sistem politik yang demokratis, menegakkan *rule of law* atau *law enforcement*, dan berkomitmen untuk kemajuan menuju kesejahteraan, keadilan sosial dan kepemimpinan tegas, visioner, jujur dan terlegitimasi tanpa kebohongan politik. Oleh karena itu, perlu untuk mengintegrasikan demokrasi dari semua bagian masyarakat sipil dan mempromosikan pemerintahan yang baik dan terciptanya penegakan hukum serta *good governance*.

Menurut Solihah (2016), *rent seeking* ada karena dilakukannya hubungan antara bisnis dan politik di masa sekarang ini merupakan akar dari korupsi, yakni orang yang melakukan *rent seeking* (*rent seekers*) menggunakan sebagian besar sumber daya milik negara untuk kepentingan individu ataupun keluarganya. Hubungan ini dilaksanakan di luar hubungan publik yang benar, dimana para pengusaha melakukan negosiasi dengan cara memberikan atau membayar uang (secara individu) kepada pejabat publik (politisi/ pemerintah/ birokrat) untuk melancarkan kepentingan pengusaha tersebut. Dalam penelitian ini teori *rent seeking* digunakan untuk menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR.

### **Teori *Stakeholders***

Teori *Stakeholders* awalnya dikenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963, yaitu “*Those groups without whose support the organization would cease to exist*” Freeman & Reed (1983) yakni kelompok atau individu yang memberi atau diberikan pengaruh oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan perlu memberi manfaat kepada pemegang saham (*stakeholder*, pemerintah, konsumen, masyarakat, kreditor, *supplier*, dan pihak lain), tidak hanya bekerja untuk kepentingan independen. Esensi pemikiran tersebut menentukan keberadaan suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki pengaruh kuat terhadap sokongan dari golongan yang memiliki keterkaitan terhadap organisasi yang di maksud. Lebih luas lagi pemaparan Freeman & Reed (1983) mengenai teori *stakeholder* serta memperkenalkannya dalam 2

model, diantaranya model tentang (1) perencanaan dan kebijakan usaha; serta (2) tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen pemangku kepentingan.

Teori *stakeholders* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan variabel CSR. Hal ini karena pada dasarnya perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingannya terutama pada ketersediaan sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh pemegang saham untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti pekerja, pasar untuk produk perusahaan dan lain sebagainya. Dalam memelihara hubungan baik perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) maka strategi yang diperlukan perusahaan salah satunya yaitu melalui penerapan CSR perusahaan yang sesuai dengan laporan keberlanjutan dalam menyampaikan informasi tentang kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan.

### **Kerangka Konseptual**

Pengungkapan laporan kewajiban sosial perusahaan (CSR) sudah signifikan menarik perhatian penelitian dalam beberapa dekade terakhir karena bertambahnya tingkatan minat masyarakat dalam CSR (Muttakin *et al.*, 2018). Perusahaan yang terhubung secara politis lebih mungkin menghadirkan pelaporan dengan baik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait hubungan antara kehadiran politisi di Dewan Direksi perusahaan dan pelaporan CSR (Bianchi, 2019). Perusahaan yang mempunyai hubungan politik telah banyak meningkatkan kinerja CSR terutama dibidang filantropi (Huang & Zhao, 2016). Tanggung jawab sosial perusahaan masih menjadi isu menarik dalam lingkungan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat (Avram *et al.*, 2018; Galvão *et al.*, 2019; Schmidt & Cracau, 2017).

CSR menjadi tidak sesuai dengan tujuannya dan menjadi rentan korupsi ketika bisnis sudah dikaitkan dengan politik. Umumnya bisnis terkoneksi secara politik di dunia ini, walaupun tidak untuk negara-negara yang menerapkan peraturan yang ketat terhadap konflik kepentingan politik. Perusahaan bisa memperoleh manfaat lebih terkait hadirnya koneksi politik tersebut, berbeda dengan perusahaan yang tak terkoneksi (Khan *et al.*, 2016; Liu *et al.*, 2018; Muttakin *et al.*, 2018).

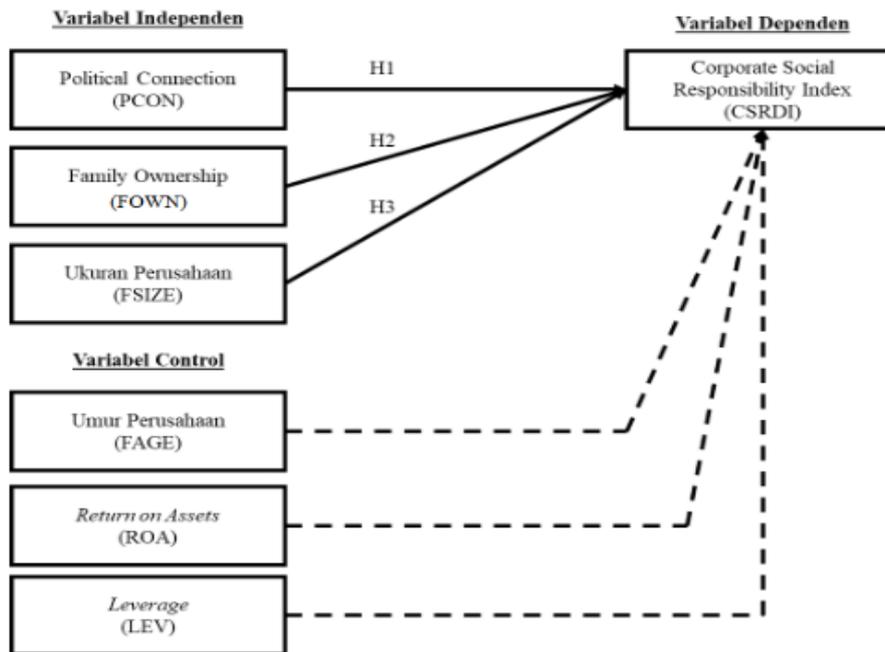
Hal berbeda ditunjukkan oleh beberapa penelitian, dimana aktivitas CSR suatu perusahaan justru akan meningkat ketika terjadi pergantian pejabat pemerintah. Perusahaan mengeluarkan lebih banyak dana CSR untuk pemerintah guna membangun hubungan baik dengan pemerintahan baru tersebut dan berharap akan menerima imbalan masa depan yang lebih besar berupa subsidi pemerintah dan cenderung mengungguli perusahaan yang tidak menghabiskan sumber daya untuk menjalin hubungan dengan pemerintah (Lin *et al.*, 2015). Ini artinya perusahaan yang terkoneksi politik berusaha menerapkan praktik pemburuan pendapatan (*rent-seeking*) dengan cara monopoli dengan bermodalkan kekuasaan politik (Krueger, 1974). Perusahaan yang membelanjakan lebih banyak CSR untuk terikat dengan pemerintah menerima imbalan masa depan yang lebih besar berupa subsidi pemerintah (Lin *et al.*, 2015; Zhang, 2017).

Pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan CSR tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan suatu negara, yakni berkaitan dengan stabilitas politik negara tersebut. Koneksi politik rentan terjadi di negara-negara dengan kualitas kelembagaan dan lingkungan peraturan yang lemah (Faccio, 2010; Khan *et al.*, 2016). Selain itu perilaku rent-seeking yang sering dilakukan oleh pihak dengan koneksi politik sangat dipengaruhi pula oleh kualitas kelembagaan suatu negara (Choi & Storr, 2018).

Pada penelitian ditambahkan beberapa variabel kontrol yang berdasarkan penelitian terdahulu diyakini mempengaruhi pengungkapan CSR. Penggunaan variable

kontrol dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi variabel-variabel atau faktor-faktor lain diluar model yang mempengaruhi uji variabel independen dan dependen. Adapun beberapa variabel tersebut yakni efisiensi keuangan (ROA), umur perusahaan (*Year*), dan *leverage*.

Adapun kerangka konseptual yang telah dijelaskan tersebut digambarkan berikut ini:



Gambar 1  
Model Penelitian

### Hipotesis

Teori legitimasi menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dalam suatu organisasi selalu dimotivasi oleh perilaku mencari legitimasi (Watts *et al.*, 2019). Teori ini sering digunakan dalam berbagai penelitian untuk lebih memahami tentang CSR sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan, mendapatkan penerimaan sosial, dan, pada akhirnya berdampak pada kelangsungan hidup organisasi (Duff, 2017; Lee & Comello, 2018; Muttakin *et al.*, 2018). Dengan kata lain, perusahaan berusaha memenuhi harapan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat agar posisi perusahaan kuat (*legitimate*) di masyarakat. Dan sebaliknya, ketika perusahaan gagal memenuhi harapan masyarakat, maka perusahaan akan menghadapi ancaman legitimasi.

Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menghindari potensi tekanan pemangku kepentingan untuk keterlibatan CSR. Koneksi politik mampu memangkas kebutuhan manajemen untuk menggunakan pengungkapan CSR sebagai strategi yang tepat dengan menghubungkan dengan perusahaan dan politisi yang dapat mengurangi beban pemangku kepentingan akibat kinerja CSR yang buruk. Lin *et al.* (2015) menemukan bahwa aktivitas CSR suatu perusahaan akan meningkat ketika terjadi pergantian pejabat pemerintah. Perusahaan mengeluarkan lebih banyak dana CSR untuk pemerintah guna membangun hubungan baik dengan pemerintah dan berharap akan menerima imbalan masa depan yang lebih besar berupa subsidi pemerintah dan cenderung mengungguli perusahaan yang tidak menghabiskan sumber daya untuk menjalin hubungan dengan pemerintah.

Bisnis yang terkait secara politik adalah umum di seluruh dunia di negara-negara dengan aturan ketat terhadap kepentingan politik. Secara khusus, koneksi politik perusahaan lazim di wilayah negara dengan tingkat korupsi tinggi serta memiliki peraturan buruk. Penelitian tentang hubungan politik dimulai pada tahun 1970-an. Krueger menunjukkan bahwa pengusaha dapat membangun hubungan dengan pejabat pemerintah untuk menuai keuntungan finansial (Krueger, 1974).

Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dan pemerintahan, dimana kegiatan sosial perusahaan dilakukan untuk melayani pemerintah guna mendapatkan dukungan dan manfaat politik yang berkelanjutan (Xu & Zeng, 2016; Zhang, 2017; Wang *et al.* 2018). Uraian ini didukung oleh penelitian Huang & Zhao (2016), Rahman & Ismail (2016), Fu, (2019), dan Saraswati *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dalam pengungkapan CSR (tanggung jawab sosial). Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Putri *et al.* (2019), Putri *et al.*, (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik berusaha melakukan praktik pemburuan pendapatan (*rent-seeking*) dengan cara monopoli dengan bermodalkan kekuasaan politik (Krueger, 1974). Perusahaan yang membelanjakan lebih banyak CSR untuk terikat dengan pemerintah menerima imbalan masa depan yang lebih besar berupa subsidi pemerintah (Lin *et al.*, 2015; Zhang, 2017). Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis dalam penelitian, yakni:

H<sub>1</sub> : Koneksi Politik Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan

Struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap citra dan reputasi keluarga melalui aktivitas perusahaan. Kontrak sosial tersebut dapat terpenuhi dengan cara memenuhi nilai-nilai sosial untuk keberlangsungan keluarga ditengah masyarakat (Sandri *et al.* 2021).

Perusahaan terbentuk tidak lain untuk kesejahteraan para pemiliknya. Keluarga adalah seluruh individu serta perusahaan yang memiliki catatan kepemilikan (kepemilikan > 5% wajib dicatat). Perusahaan negara, publik, lembaga keuangan (seperti: reksa dana, lembaga investasi, koperasi, asuransi, dana pensiun, bank) dan publik (kepemilikan individu tidak terdaftar) itu dikecualikan (Wahyu & Setyawan, 2015). Ciri-ciri struktur milik perusahaan di Indonesia didominasi dengan keluarga, baik itu dari keluarga pendiri ataupun bukan.

Pada perusahaan keluarga kerap kali adanya anggota keluarga dari pemilik usaha tersebut. Dimana mereka mewakili keluarga tersebut dalam mengelola perusahaan (Aprianto, 2015). Oleh karena itu terlihat bahwa perusahaan keluarga berkinerja lebih baik diperbandingkan oleh perusahaan yang tidak dimiliki keluarga, sebab perusahaan keluarga lebih berkomitmen agar dapat mewariskan perusahaan kepada generasi selanjutnya.

Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR namun tidak signifikan dan keberadaan komisaris independen semakin menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung rendah dalam menyajikan informasi terkait CSR (Nurfatimah, 2018). Keluarga sebagai pemegang saham pengendali memiliki akses lebih besar terhadap informasi daripada minoritas pemegang saham, yang menimbulkan peningkatan kesenjangan keterangan antara pengendalian pemegang saham juga pemegang saham minoritas. Di Indonesia, perusahaan milik publik yang dijalankan oleh

keluarga atau pemerintah atau lembaga keuangan lebih baik daripada perusahaan milik publik tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Asumsi ini didukung dan ditemukan dalam penelitian Amidjaya dan Widagdo (2019) serta Gavana (2017) yaitu terdapat pengaruh positif antara kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR perusahaan (Amidjaya & Widagdo, 2019; Sari, 2016; Gavana *et al.*, 2017). Namun, hasil berbeda juga ditemukan oleh (Rudyanto & Siregar, 2017; Sari, 2016; Zainal, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis dalam penelitian yaitu:

H<sub>2</sub>: Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR perusahaan

Teori sinyal menyatakan bahwa manajemen mengupayakan mengungkapkan informasi positif kepada pemegang kepentingan. Pengungkapan informasi merupakan sinyal positif yang memungkinkan untuk diungkapkan ketika perusahaan memiliki total aset yang besar yang sekaligus menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang besar. Aset besar yang dimiliki perusahaan condong memperoleh taraf produktivitas yang lebih tinggi, juga dapat menaikkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dipengaruhi oleh CSR, dengan perusahaan yang lebih besar mempunyai biaya perusahaan yang lebih tinggi, cakupan informasi akan lebih luas (Fawwazy, 2019). Ukuran perusahaan signifikan memberi pengaruh pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara positif. Bertambahnya besaran ukuran sebuah perusahaan, sistem informasi pelaporan yang lebih baik dan dapat menghasilkan berbagai informasi keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan investor (Waluyo, 2017). Ukuran perusahaan di negara berkembang belum menjalankan tanggung jawab sosial secara optimal. Di sebuah negara berkembang seperti Indonesia saat ini sudah ada tren memanfaatkan praktik CSR perusahaan untuk mendukung program pemerintah. Kebijakan dan regulasi terkait CSR perusahaan berukuran besar memenuhi kebutuhan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya (Golrida *et al.*, 2019). Asumsi ini didukung dan ditemukan dalam penelitian Fauziah (2019) menemukan pengaruh yang positif pada ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Memperhatikan penjelasan mengenai ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR, didapati hipotesis seperti:

H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR perusahaan

## **METODE PENELITIAN**

Agar didapatkan keterangan empiris bahwa koneksi politik, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan maka dilakukanlah penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif dimanfaatkan pada penelitian sebagai pendekatan penelitiannya, dimana merupakan metode yang dasarnya dari pemahaman positivisme, dimanfaatkan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu memanfaatkan alat penelitian yang sifatnya statistik atau kuantitatif, serta memiliki manfaat untuk menganalisa hipotesis dalam penelitian. Penelitian memanfaatkan data sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengunjungi situs resminya yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan website perusahaan BUMN. Seluruh perusahaan go publik yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019 menjadi populasi dalam penelitian ini.

Untuk metode pengambilan sampel menerapkan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Beberapa kriteria yang diidentifikasi sebagai dasar pemilihan sampel yakni:

1. Perusahaan *go publik* dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia periode 2015-2019 dan sudah di audit
2. Perusahaan konsisten menerbitkan data laporan keuangan tahunan periode 2015-2019
3. Perusahaan konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan periode 2015-2019

Definisi dari masing-masing variabel penelitian ini sebagai berikut:

Variabel dependen yaitu *Corporate Social Responsibility* atau CSR (Y). CSR artinya stabilitas perusahaan terbagi menjadi tiga bidang yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Carroll, 1991; Elkington, 1997). Alat pengukuran CSRI yang dimanfaatkan pada penelitian ini berdasar pada instrument *Global Reporting Initiative (GRI)* Tahun 2016. GRI panduan pelaporan permanen yang memberikan prinsip pelaporan, pengungkapan umum, dan pedoman penegakan untuk penyusunan pelaporan permanen oleh perusahaan, terlepas dari apapun ukuran, ruang lingkup, dan lokasi.

Variabel bebas atau dapat disebut variabel independen merupakan variabel dengan hubungan atau memberikan pengaruh variabel bebasnya, adapun variabel bebas disini ialah:

1. Koneksi Politik (*Political Connection*)

Penelitian teoritis mengenai koneksi politik menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih mampu memahami proses kebijakan publik, mendapatkan akses secara langsung kepada politisi, birokrat dan kepada pemerintah (Harymawan & Nowland, 2016). Perusahaan yang terhubung secara politik termasuk perusahaan *risk taker*.

2. Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

Dalam perusahaan keluarga, selalu ada banyak anggota keluarga pemilik perusahaan yang bersama atau terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Mereka adalah wakil dari keluarga pemilik dalam pengelolaan perusahaan (Aprianto, 2015).

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Company Scale*) disebut juga ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan.

4. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan waktu yang telah dilalui perusahaan sejak berdirinya perusahaan hingga saat dilakukannya penelitian. Pengukuran umur perusahaan ini menggunakan pengukuran dari penelitian (Huang & Zhao, 2016).

5. Efisiensi Keuangan

Pengukuran efisiensi keuangan perusahaan menerapkan *Return on Assets (ROA)* perusahaan. ROA sendiri adalah rasio untuk mengevaluasi kesanggupan perusahaan untuk menggunakan seluruh aset perusahaan untuk operasional perusahaan dan menghasilkan laba.

6. *Leverage*

*Leverage* merupakan rasio nilai buku total utang terhadap total aset. Tingkat *leverage* tinggi pada perusahaan menandakan jika perusahaan mengandalkan kredit eksternal guna membiayai aset yang dimiliki yang kemudian dapat mengungkapkan laba yang tinggi dan mengurangi biaya yang ada, yang mencakup biaya publikasi CSR. Tabel berikut ini menjelaskan pengukuran variabel dalam penelitian.

**Tabel 1**  
**Pengukuran Variabel**

Variabel Penelitian	Indikator	Skala
<i>Corporate Social Responsibility Index</i> (CSRDI)	$CSRDI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total indikator pengungkapan CSR}} \times 100\%$	Rasio
Political Connection (PCON)	Memiliki Kepemilikan Saham Pemerintah, Dewan Direksi dan Komisaris di Perusahaan diberikan skor 1, dan sebaliknya jika tidak memiliki salah satu dari poin diatas maka dinyatakan tidak terkoneksi politik dan diberikan skor 0.	Dummy
Family Ownership (FOWN)	Memiliki presentase kepemilikan saham lebih dari lima persen (5%) diberikan skor 1, dan sebaliknya jika tidak memiliki salah satu dari poin diatas maka dinyatakan tidak terdapat kepemilikan keluarga dan diberikan skor 0.	Dummy
Ukuran Perusahaan (FSIZE)	$Company Scale = Total Assets$	Rasio
Umur Perusahaan (FAGE)	Tanggal berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 2017 yang merupakan tahun akhir sampel penelitian.	Dummy
<i>Return on Assets</i> (ROA)	$ROA = \frac{Net Profit}{Total Assets} \times 100\%$	Rasio
Leverage (LEV)	$DER = \frac{Total Liability}{Total Equity} \times 100\%$	Rasio

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan *multiple regression* (regresi berganda) sebagai metode analisisnya, persamaan regresi linear berganda yang digunakan sebagaimana di bawah ini.

$$CSRDI = \alpha + \beta_1 PCON + \beta_2 FOWN + \beta_3 FSIZE + \beta_4 FAGE + \beta_5 ROA + \beta_6 LEV + \varepsilon$$

Keterangan:

- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$  : Koefisien Regresi
- PCON : *Political Connection*
- FOWN: *Family Ownership*
- FSIZE : *Company Size*
- FAGE : *Company Age*
- ROA : *Return On Assets*
- LEV : *Leverage*
- $\varepsilon$  : Standar Error

Dalam regresi berganda, diperlukannya asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan nilai taksiran atau nilai koefisien yang tidak dapat dijadikan nilai kesempurnaan. Uji asumsi klasik tersusun dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan BUMN pada periode 2015 – 2019 menjadi objek pada penelitian dan juga telah

menyampaikan laporan *Sustainability Report* (SR) dengan jumlah 69 perusahaan. Berikut rincian perolehan sampel perusahaan *go public* menurut kriteria yang ditentukan:

**Tabel 2**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan BUMN dan Perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dan memiliki SR	69
2	Perusahaan yang tidak konsisten menerbitkan data laporan keuangan tahunan periode 2015-2019.	(6)
3	Perusahaan tidak konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan periode 2015-2019.	(7)
4	Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian periode 2015-2019	56
<b>Jumlah Observasi 56 (perusahaan) x 5 (2015-2019)</b>		<b>280</b>

Sumber : BEI dan Web Perusahaan BUMN (2020)

### Analisis Statistik Deskriptif

Didalam statistik deskriptif menggambarkan data yang tercermin dari besaran standar deviasi, rata-rata, varian, maksimum, minimum, jumlah, *range*, dan kemencengan (Ghozali, 2018:19). Terlihat pada tabel di bawah ini hasil uji statistik deskriptif:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	280	10,2832	21,1839	17,446649	1,8522841
FAGE	280	3	160	47,14	24,382
ROA	280	-,2600	,4666	,037804	,0709357
LEV	280	-3,3604	21,6311	2,867418	3,0949893
CSR	280	,0220	,7473	,305458	,1896166
Valid N (listwise)	280				

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24 (2021)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

1. Ukuran perusahaan (SIZE) yang disajikan dalam rasio menunjukkan nilai minimum sebesar 10,2832 dan maksimum sebesar nilai *maximum* sebesar 21,1839 menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,446649 dengan standar deviasi sebesar 1,8522841. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui ukuran perusahaan terendah berada pada PT Vale Indonesia Tbk di tahun 2017 dan ukuran perusahaan tertinggi berada pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di tahun 2019. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan perusahaan terbesar diantara perusahaan lain yang dijadikan sampel penelitian karena perusahaan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat.
2. Umur perusahaan (FAGE) yang disajikan dalam skala nominal menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum 160 dengan mean sebesar 47,14 dengan standar deviasi sebesar 24,382. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa umur perusahaan terendah berada pada PT Merdeka Copper Gold Tbk, hal ini karena perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2012 sehingga pada tahun penelitian usia PT Merdeka Copper Gold Tbk baru berusia 3 tahun. Sementara itu, perusahaan yang memiliki umur tertinggi berada pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, hal ini karena

perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1859 sehingga pada tahun penelitian usia perusahaan telah mencapai usia 160 tahun. Secara rata-rata usia perusahaan go publik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berusia 47 tahun.

3. *Return on Assets* (ROA) yang disajikan dalam rasio memperoleh nilai *minimum* - 0,2600 dan maksimum sebesar 0,4666. Menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,037804 dengan standar deviasi sebesar 0,0709357. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan yang memiliki ROA terendah berada pada Sampoerna Kayoe di tahun 2016, hal ini karena perusahaan tersebut mengalami kerugian mencapai Rp. 407.379 Juta Rupiah. Sementara itu, ROA tertinggi berada pada Unilever Indonesia di tahun 2018, hal ini karena perusahaan memiliki laba sebesar Rp. 9.109.445. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.
4. *Leverage* (LEV) yang disajikan dalam rasio memperoleh nilai *minimum* sebesar - 3,3604 dan maksimum sebesar 21,6311, menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,867418 dengan standar deviasi 3,0949893. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan yang memiliki nilai *Leverage* terendah berada pada PT. Bakrie & Brothers di tahun 2015, sebab nilai ekuitas negatif pada tahun tersebut atau perusahaan sudah tidak memiliki modal. Sementara itu perusahaan yang memiliki nilai *leverage* tertinggi berada pada PT Sampoerna Kayoe di tahun 2016. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disajikan dalam rasio memiliki nilai minimum sebesar 0,0220 dengan nilai mean maksimum sebesar 0,743. Menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,305458 dengan standar deviasi 0,1896166. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh score pengungkapan CSR terendah berada di PT Hutama Karyadi pada tahun 2019 dan diketahui perusahaan yang memiliki score pengungkapan CSR tertinggi berada pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk di tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memenuhi pengungkapan CSR sebesar 0,305458 (30,54%).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik Frekuensi untuk**  
**variabel dummy**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>PCON</b>	0	189	67.5	67.5	67.5
	1	91	32.5	32.5	100.0
	Total	280	100.0	100.0	
<b>FWON</b>	0	267	95.4	95.4	95.4
	1	13	4.6	4.6	100.0
	Total	280	100.0	100.0	

Dapat diketahui variabel PCOM merupakan variabel dummy, 1 jika perusahaan memiliki kepemilikan saham pemerintah, dan 0 jika perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham pemerintah. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah

perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan saham pemerintah sebesar 91 (32,5%) dan perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham pemerintah sebesar 189 (67,5%).

Selanjutnya untuk variabel FWOM dikatakan, 1 jika memiliki presentase kepemilikan saham keluarga lebih dari lima persen (5%), dan 0 jika kepemilikan saham keluarga kurang dari lima persen (5%). Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan sampel yang memiliki presentase kepemilikan saham keluarga lebih dari lima persen (5%) sebesar 13 perusahaan (4,6%), dan kepemilikan saham keluarga kurang dari lima persen (5%) sebesar 267 perusahaan (95,4%).

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diterapkan untuk menguji hipotesis, sebab tujuan uji ini untuk mencari tahu kemampuan, serta jaminan suatu model regresi yang dimanfaatkan pada penelitian, normal atau tidaknya suatu variabel.

### Uji Normalitas

Uji kolmogorov smirnov dimanfaatkan pada uji normalitas dalam penelitian, dimana keputusan diperoleh dari nilai signifikan, yang mana apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,5 dapat dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		280
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14195462
Most Extreme Differences	Absolute	,042
	Positive	,042
	Negative	-,036
Test Statistic		,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24 (2021)

Didapati besaran nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi terlihat  $> 0,05$  sehingga dikatakan data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menjelaskan jika pengambilan ketetapan ada tidak nya multikolinearitas yaitu:

- Apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  dikatakan tidak adanya multikolinearitas
- Apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $> 10$  dan nilai *tolerance*  $< 0,1$  dikatakan adanya multikolinearitas. Tabel berikut memperlihatkan hasil uji multikolinearitas pada penelitian:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PCON	,886	1,128
	FOWN	,910	1,099
	SIZE	,813	1,230
	FAGE	,881	1,135
	ROA	,858	1,165
	LEV	,846	1,182

a. Dependent Variable: CSRDI

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24 (2021)

Seluruh variabel independen yaitu: *political connection* (PCON), *family ownership* (FOWN), ukuran perusahaan (FSIZE), umur perusahaan (FAGE), *return on assets* (ROA), dan *leverage* (LEV) memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan memiliki nilai VIF dibawah 10.

### Uji Autokorelasi

Guna mencari tahu terdapat tidaknya autokorelasi suatu penelitian, dilakukanlah uji durbin watson. Dimana uji ini dimanfaatkan pada model regresi tahap pertama, serta tidak terdapat variabel lag antar variabel independen (Ghozali, 2018). Adapun hipotesis pada penelitian yakni:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

N (K = 6)	DW hitung	4-dU	4-dL	Tabel Dw Batas Bawah (dl)	Tabel DW Batas Atas (du)	Kesimpulan
280	1,957	2,169	2,293	1,707	1,831	Tidak ada autokorelasi, positif dan negatif

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24 (2021)

Terlihat pada tabel nilai DW-Hitung sebesar 1,957. Apabila dipersamakan dengan nilai tabel alpha 5%, jumlah sampel (n) sebesar 280 serta jumlah variabel sebanyak 6 (k=6), didapati nilai tabel Durbin Watson yaitu  $dL = 1,707$  dan  $du = 1,831$ . Dari nilai Durbin-Watson 1,957 dapat diambil kesimpulan  $du < d < 4-du$  atau  $1,831 < 1,957 < 2,169$ . Yang kemudian dapat ditetapkan tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji gletser digunakan guna mencari tahu gejala heteroskedastisitas pada suatu variabel. Keputusan yang akan diambil setelah pengujian yakni apabila signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2018) pada taraf kepercayaan 95%, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Kesimpulan
PCON	0,618	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
FOWN	0,409	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
SIZE	0,746	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
FAGE	0,987	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
ROA	0,579	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LEV	0,216	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24 (2021)

Tabel di atas memperlihatkan nilai signifikan yang diperoleh seluruh variabel > 0,05 sehingga dinyatakan terhindar dari heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

Uji t dan uji f dimanfaatkan dalam penelitian guna melihat besaran pengaruh setiap variabel bebasnya terhadap variabel terikat, dan juga besaran pengaruh variabel tersebut jika dilakukan secara bersamaan.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Prediksi	Coef B	Sig	Keputusan
Independen	Hipotesis			
PCON	Positif	0,199	0,000	diterima
FWON	Positif	0,233	0,000	diterima
SIZE	Positif	0,031	0,000	diterima
FAGE	Negatif	-0,001	0,078	ditolak
ROA	Negatif	-0,080	0,271	ditolak
LEV	Negatif	-0,009	0,001	diterima
F-test	35,683			
F-sig	0,000			
Adjusted R <sup>2</sup>	0,427			

Berdasar pada *output* pengujian diatas, maka dapat dibuatkan persamaan regresi seperti dibawah ini:

$$\text{CSR} = -0,254 + 0,199 \text{ PCON} + 0,233 \text{ FOWN} + 0,031 \text{ SIZE} - 0,001 \text{ FAGE} - 0,080 \text{ ROA} - 0,009 \text{ LEV} + \varepsilon$$

- Variabel *political connection* (PCON) mendapat nilai beta sebesar 0,199 dengan nilai t-statistik sebesar 10,218 > nilai t-tabel sebesar 1,969 (df=280; alpha=0,05) dan nilai signifikan 0,000 < 0,005. Dikatakan hipotesis pertama dapat diterima, sehingga disimpulkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.
- Variabel *family ownership* (FOWN) mendapat nilai beta sebesar 0,233 dengan nilai t-statistik sebesar 5,441 > nilai t-tabel sebesar 1,969 (df=280; alpha=0,05) dan nilai signifikan 0,000 < 0,005. Dengan demikian, hipotesis diterima, yang di artikan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.
- Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memperoleh nilai beta sebesar 0,031 dengan nilai t-statistik sebesar 6,004 > nilai t-tabel sebesar 1,969 (df=280; alpha=0,05) dan

nilai signifikan  $0,000 < 0,005$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

Berdasarkan Tabel 9 diatas, hasil uji F yang menghasilkan nilai F hitung sebesar 35.683 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, diterima, artinya variabel *political connection*, *family ownership*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan.

Merujuk pada tabel 9 didapati nilai R-Square sebesar 0,440 atau sebesar 44%. Yang berarti *political connection* (PCON), *family ownership* (FOWN), ukuran perusahaan (FSIZE), umur perusahaan (FAGE), *return on assets* (ROA), dan *leverage* (LEV) secara simultan memberikan kontribusi terhadap pengungkapan CSR perusahaan sebesar 44% kemudian 56% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan**

Hasil pengujian hipotesis pertama yang dilakukan menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan go publik dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015 – 2019. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Anggita *et al.* (2019) yang mendapati jika koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Dimana perusahaan yang memiliki hubungan politik lebih terdorong dalam mengungkapkan CSR. Hal ini sesuai dengan teori *rent seeking* yang menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan atau nilai dari pihak lain dengan mengubah bisnis atau lingkungan bisnis. Oleh karena itu, pengusaha profesional melobi untuk mempengaruhi kebijakan sehingga mereka lebih memiliki diri mereka sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Sehingga koneksi politik dan pemanfaatan kekuatan dari koneksi tersebut sangat erat kaitannya dengan *rent-seeking theory*. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan berusaha secara lebih maksimal untuk melakukan pengungkapan CSR. Hal ini karena direksi perusahaan akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah melalui pengungkapan CSR, yang mana pelaksanaan CSR merupakan keharusan bagi Perseroan Terbatas yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga dalam upaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah, maka perusahaan yang memiliki koneksi politik akan berusaha mengungkapkan CSR nya secara lebih baik.

### **Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan**

Hasil pengujian hipotesis kedua yang dilakukan memperlihatkan jika bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan go publik dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015 – 2019. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$  hasil pengujian didapatkan koefisien bertanda positif yang menandakan bahwa semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh keluarga maka tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan tersebut semakin meningkat. Struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR dilakukan untuk menambah nama baik serta legitimasi perusahaan terhadap masyarakat. Dalam teori legitimasi, perusahaan memiliki kesepakatan atau kewajiban untuk beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Teori legitimasi sering digunakan dalam berbagai penelitian untuk lebih memahami teori CSR sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan, mendapatkan penerimaan sosial, dan akan berdampak pada kelangsungan hidup organisasi (Duff, 2017; Lee &

Camello, 2018; dan Muttakin *et al.*, 2018). Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan penelitian Sari (2016) dimana kepemilikan keluarga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR di perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga memiliki tingkat tanggung jawab yang lebih dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan CSR karena tinggi perusahaan keluarga lebih berkomitmen agar dapat mewariskan perusahaan kepada generasi selanjutnya. Kepemilikan keluarga sebagai pengendali yang mempunyai posisi kepemilikan yang kuat dapat menunjuk manajemen puncak dari anggota keluarga yang diharapkan mampu mengelola perusahaan dengan integritas yang tinggi yang ditunjang kemampuan dan kompetensi yang dapat diandalkan diharapkan mampu mengelola dan menjaga perusahaan dengan baik untuk kelangsungan perusahaan beserta pemangku kepentingan, sehingga perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan melakukan pengungkapan CSR secara maksimal agar mendapat legitimasi dari masyarakat.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan**

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan go publik dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015 – 2019. Perusahaan yang mempunyai aset besar condong memperoleh taraf produktivitas yang lebih tinggi, juga dapat menaikkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi CSR, dimana perusahaan yang lebih besar mempunyai biaya perusahaan yang lebih tinggi, cakupan informasi akan lebih luas (Fawwazy, 2019). Ukuran perusahaan signifikan memberi pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara positif. Semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan, sistem informasi pelaporan yang lebih baik dan dapat menghasilkan berbagai informasi keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan investor (Waluyo, 2017). Ukuran perusahaan di negara berkembang belum menjalankan tanggung jawab sosial secara optimal. Di sebuah negara berkembang seperti Indonesia saat ini sudah ada tren memanfaatkan praktik CSR perusahaan untuk mendukung program pemerintah. Kebijakan dan regulasi terkait CSR perusahaan berukuran besar memenuhi kebutuhan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya (Golrida *et al.*, 2019).

Selanjutnya, hasil pengujian variabel kontrol ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sehingga mengkonfirmasi jika tingkat profitabilitas perusahaan tidak memberi pengaruh luas pengungkapan informasi sosialnya. Perusahaan dengan laba yang besar tidak menentukan kesanggupan untuk menempatkan dana lebihnya pada kegiatan sosial beserta pengungkapannya. Selain itu, perusahaan dengan profit rendah memicu manajemen dalam mengungkap keterangan lebih lanjut sebab perusahaan dengan profit rendah condong lebih besar mengungkap keterangan pada publik agar terkesan benar akan kinerjanya. Pengungkapan tema sosial yang lebih rinci adalah sebagai salah satu upaya perusahaan untuk menjaga citra baik sebagai perusahaan dengan kinerja yang baik. Maka dari itu hal diatas menjadi satu alasan mengapa terdapat hubungan negatif antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR.

*Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan dengan rasio leverage tinggi menyebabkan tingginya pengawasan akan kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Hubungannya dengan agensi teori, dimana dengan leverage yang tinggi meminimalisir CSR yang diungkap oleh perusahaan untuk membuat pengalihan kepada

debtholders. Hal ini juga menjadi satu alasan mengapa rasio leverage perusahaan yang tinggi menimbulkan CSR yang diungkapkan rendah. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sunaryo dan Mahfud (2016) keputusan untuk mengungkapkan CSR akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholder terhadap aktivitas perusahaan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggungjawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Umur perusahaan sebagai variabel control tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini mendukung penelitian Arjanggih dan Zulaikha (2016) bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan akan semakin mengungkapkan informasi sosial sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk tetap diterima masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki hubungan pada pengungkapan CSR karena seluruh perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan melakukan pengungkapan CSR tidak bergantung pada usia perusahaan.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Mengacu pada data yang diperoleh dan uji yang sudah terlaksana terhadap 56 sampel perusahaan dengan menggunakan mode. regresi berganda, sehingga dapat disimpulkan:

- Koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015 – 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi koneksi politik suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
- Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015 – 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga maka akan semakin baik pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* dan perusahaan BUMN yang berada di Indonesia pada periode 2015 – 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aset suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
- 

### **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa perusahaan *go public* dan perusahaan BUMN yang tidak menyediakan data laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan yang tidak lengkap pada periode 2015-2019.

### **Implikasi Penelitian**

Koneksi politik terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan publik dan perusahaan BUMN. Untuk itu disarankan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini

karena koneksi politik diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemangku kepentingan perusahaan yang ditunjukkan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab social perusahaan.

Selain itu, jika investor peduli terhadap keberlanjutan perusahaan dan ingin berinvestasi, maka investor sebaiknya meneliti terlebih dahulu komposisi kepemilikan perusahaan. Hal ini karena akan lebih baik bagi investor untuk memilih perusahaan yang memiliki kepemilikan saham keluarga karena hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan keluarga terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut membuktikan bahwa perusahaan berkinerja keluarga berkinerja lebih baik dibandingkan oleh perusahaan yang tidak memiliki keluarga, karena mampu mengelola dan menjaga perusahaan dengan lebih baik untuk keberlangsungan perusahaan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Untuk itu kepada perusahaan go public di harapkan dapat meningkatkan ukuran perusahaan karena perusahaan dengan total aset besar dapat menjalankan dengan tingkat efisiensi lebih besar dibandingkan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil. Hal ini akan membuktikan bahwa apabila ukuran perusahaan semakin besar, sistem informasi pelaporannya pub semakin baik dan dapat menghasilkan berbagai informasi keuangan serta informasi lain yang dibutuhkan investor.

#### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Kepada penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memasukan alternatif variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti kualitas audit serta likuiditas. Selain itu dalam pengumpulan data, disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan observasi langsung ke perusahaan tidak hanya berdasarkan laporan sustainability report. Hal ini agar penelitian sebelumnya dapat menilai kondisi nyata dilingkungan perusahaan dengan laporan yang ada di sustainability report.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amidjaya, P. G., dan Widagdo, A. K. (2019). Sustainability reporting in Indonesian listed banks: Do corporate governance, ownership structure and digital banking matter?. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), pp. 231–247.
- Anggita, M., Putri, T., & Kurniawan, A. (2019). The Effect of Tax Avoidance, Earnings Management and Political Connection on Corporate Social Responsibility Disclosure : Indonesian Manufacturing Companies Evidence. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 3(2), 212–225.
- Aprianto, R. (2015). Proporsisi Hukum Antara Surat Edaran BI Nomor 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi ANti Fraud Bagi BU dengan Peraturan BI Nomor 11/25/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Journal Privat Law*, 7(1), 7–27.
- Arjanggie, Aulia Rizki., dan Zulaikha. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawan Sosial Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Diponogoro Journal of Accounting*. Vol. 4, No. 3, pp. 1-11.

- Avram, D. O., Domnanovich, J., Kronenberg, C., & Scholz, M. (2018). Exploring the Integration of Corporate Social Responsibility Into the Strategies of Small- and Medium-Sized Enterprises: A Systematic Literature Review. *Journal of Cleaner Production*.
- Bianchi, M. . (2019). Political Connections and Corporate Social Responsibility Reporting in Portugal. *Faculty of Economics, University of Porto, Porto, Portugal*, 26(4).
- Bowen, H. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper and Row.
- Choi, S. G., & Storr, V. H. (2018). A Culture of Rent Seeking. *Public Choice*, 181(1–2), 101–126.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Duff, A. (2017). Corporate Social Responsibility as a Legitimacy Maintenance Strategy in the Professional Accountancy Firm. *The British Accounting Review*, 49(6), 513–531.
- Faccio, M. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Journal Financial Management*, 39(3), 905–927.
- Fawwazy, M. D. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan CSR*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam. Yogyakarta.
- Fauziah, Irine. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Freeman, R., & Reed. (1983). Stockholders and Stakeholders: a New Perspective on Corporate Governance. *Californian Management Review*, 25(2), 88–106.
- Fu, Z. (2019). Research on the Influence of Political Correlation of Private Listed Companies on Corporate Social Responsibility Behavior. *American Journal of Industrial and Business Management*.
- Galvao, A., Mendes, L., Marques, C., & Mascarenhas, C. (2019). Factors Influencing Students' Corporate Social Responsibility Orientation in Higher Education. *Journal of Cleaner Production*, 215, 290–304.
- Gavana, G., Gottardo, P., & Moisello, A. M. (2017). Sustainability reporting in family firms: A panel data analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 9(1), 1–18.
- Ghafur, Jamaludin. (2018). Kampanye Pemilu dan Janji Politi. *Majalah Online Detik.com*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Golrida, K. P., Subroto, B., & Saraswati, E. (2019). The Complexity of Relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial Performance The Complexity of Relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial Performance. *Emerging Markets Journal*, 8(2), 19–25.
- Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political Connections and Earnings Quality: how do Connected Firms Respond to Changes in Political Stability and Government Effectiveness. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24Harymawa(4), 339–356.
- Huang, H., & Zhao, Z. (2016). The Influence of Political Connection on Corporate Social Responsibility—Evidence From Listed Private Companies in China. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1).
- Khan, A., Mihret, D. G., & Muttakin, M. B. (2016). Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 357–374.
- Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. *American Economic Review*, 64(64), 291–303.
- Kumala, R., & Siregar, S. V. (2020). Corporate Social Responsibility, Family Ownership and Earnings Management: The Case of Indonesia. *Social Responsibility Journal*, 17(1), 69–86.
- Lai, F. Y., Tang, H. C., Lu, S. C., Lee, Y. C., & Lin, C. C. (2020). Transformational Leadership and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement. *SAGE Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019899085>
- Lee, E., Walker, M., & Zeng, C. (2017). Do Chinese State Subsidies Affect Voluntary Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(3), 179–200.
- Lee, T. H., & Comello, M. L. G. (2018). Transparency and Industry Stigmatization in Strategic CSR Communication. *Management Communication Quarterly*, 33(1), 68–85.
- Li, S., Song, X., & Wu, H. (2014). Political Connection, Ownership Structure, and Corporate Philanthropy in China: A Strategic-Political Perspective. *Journal of Business Ethics*, 129(2), 399–411.
- Lin, K. J., Tan, J., Zhao, L., & Karim, K. (2015). In the Name of Charity: Political Connections and Strategic Corporate Social Responsibility in a Transition Economy. *Journal of Corporate Finance*, 32(327–346).
- Liu, B., Lin, Y., Chan, K. C., & Fung, H.-G. (2018). The Dark Side of Rent-Seeking: The Impact of Rent-Seeking on Earnings Management. *Journal of Business Research*, 91, 94–107.

- Mulpiani, Winri. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2(2), Hal. 77 – 90.
- Munger, M. C. (2018). Tullock and the Welfare Costs of Corruption: there is a “Political Coase Theorem”. *Public Choice*, 181(1–2), 83–100.
- Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. (2018). Corporate Political Connection and Corporate Social Responsibility Disclosures: A Neo-Pluralist Hypothesis and Empirical Evidence. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 725–744.
- Nurfatimah, S. N. (2018). Family Ownership, Commissioners Independence and Corporate Social Responsibility in Indonesian Corporate. *Indonesian Journal of Business and Economics*, 1(2), 222–235.
- Putri, W. A., Studi, P., Manajerial, A., Batam, P. N., Studi, P., Manajerial, A., & Batam, P. N. (2019). the Effect of Political Connection of Csr Disclosure With. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 3(2), 247–261.
- Rahman, I. M. ., & Ismail, K. N. I. . (2016). The Effects of Political Connection on Corporate Social Responsibility Disclosure – Evidence From Listed Companies in Malaysia. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 16–21.
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2017). The Effect of Stakeholder Pressure and Corporate Governance on the Quality of Sustainability Report. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Sampong, F., Song, N., Boahene, K., & Wadie, K. (2018). Disclosure of CSR Performance and Firm Value: New Evidence from South Africa on the Basis of the GRI Guidelines for Sustainability Disclosure. *Sustainability*, 10(12), 1–28.
- Sandri., Aurellia Bianda., Prihatni, Rida., dan Armeliza, Diah. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga Dan Tekanan Karyawan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol.2, No.3, hal 661-678.
- Saraswati, M. S. (2018). Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3(1).
- Sari, B. P. . (2016). *Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Kebijakan Dividen (studi pada perusahaan yang terdaftar di Kompas 100 Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008-2014)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sahrir., Sultan., dan Syamsuddin, Sofyan. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax

Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akutansi*, Vol. 5, No. 1, pp. 14-30.

Schmidt, M. A., & Cracau, D. (2017). Cross-Country Comparison of the Corporate Social Responsibility Orientation in Germany and Qatar: An Empirical Study among Business Students. *Business and Professional Ethics Journal*.

Simbolon, Junita., dan Memed, Sueb. (2016). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan Infrastruktur Subsektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.

Solihah, Ratnia. (2016). Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking. *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, pp. 41-52.

Sunaryo, Bustan Arya., dan Mahfud, H. Muhammad Kholiq. (2016). Pengaruh *Size*, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Umur Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5, No.2, pp. 1-14.

Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. *Economic Inquiry*, 5(3), 224–232.

Wahyu, U., & Setyawan, H. (2015). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Pajak Agresif Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *In Conference In Business, Accounting, And Management*, 2(1), 413–421.

Waluyo, W. (2017). Firm Size, Firm Age, and Firm Growth on Corporate Social Responsibility in Indonesia: The Case of Real Estate Companies. *European Research Studies Journal*, 20(4), 360–369.

Wang, Z., Reimsbach, D., & Braam, G. (2018). Political Embeddedness and The Diffusion of Corporate Social Responsibility Practices in China: A Trade-Off Between Financial and CSR Performance. *Journal of Cleaner Production*, 198, 1185–1197.

Xu, B., & Zeng, T. (2016). Profitability, State Ownership, Tax Reporting and Corporate Social Responsibility: Evidence from Chinese Listed Firms. *Social Responsibility Journal*, 12(1), 23–31.

Zainal, D. (2017). Quality of Corporate Social Responsibility Reporting (CSRR): The Influence of Ownership Structure and Company Character. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 10(1), 16–35.

Zhang, C. (2017). Political Connections and Corporate Environmental Responsibility: Adopting or Escaping. *Energy Economics*, 68, 539–547.

